



Politik Popularitas Menurut Etika Kristen

Gilrandi Aristya Dwi Pramanojari¹

gilrandy.adp@gmail

Abstract

Popularity politics cannot be separated from a democratic political system. Technological advances provide very wide space for political popularity. As a result, Christians often experience difficulties in responding to the political dynamics that occur. This study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach. As a result, populist politics is incompatible with Christian ethics if it is not based on integrity. Christian ethics places truth and justice as the basis of ethics, which can result in someone becoming unpopular.

Keywords: *politics, integrity, ethics*

Abstrak

Politik popularitas tidak dapat dipisahkan dari system politik demokrasi. Kemajuan teknologi memberi ruang yang sangat luas bagi politik popularitas. Akibatnya orang Kristen sering mengalami kebingungan dalam meresponi dinamika politik yang terjadi. Studi ini menggunakan menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dekriptif. Hasilnya politik popularitas tidak sesuai dengan etika Kristen jika tidak didasari dengan integritas. Etika Kristen menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai etika dasar, yang dapat berdampak seseorang menjadi tidak populer.

Kata kunci: *politik popularitas, integritas, etika*

¹ Pusat Studi Pentakosta Indonesia

PENDAHULUAN

Politik popularitas tidak dapat dilepaskan dalam politik demokrasi. Politik popularitas sendiri merupakan strategi politik yang lebih fokus pada memenangkan popularitas di antara pemilih. Penggunaan media sosial, retorika emosional, dan taktik-taktik lain yang bertujuan untuk membangun citra yang kuat dan menarik bagi pemilih, adalah cara yang lazim digunakan dalam politik popularitas¹. Para kandidat dan pemimpin politik membangun basis penggemar yang kuat menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Media sosial sendiri telah mengubah dinamika politik secara signifikan. Kandidat politik sekarang dapat

¹ Hamirudin, "SURVEI DAN KONSULTAN POLITIK : MEMBANGUN POPULARITAS DAN ELEKTABILITAS POLITIK," *IAIN 4* (2019): 10–17.

berkomunikasi secara langsung dengan pemilih tanpa perantara tradisional seperti media berita. Hal ini memungkinkan penggunaan pesan emosional dan naratif yang kuat untuk mempengaruhi pendapat publik. Politik popularitas sering kali menciptakan konten yang viral, yang dapat membantu dalam mencapai keterkenalan yang lebih besar.

Bahkan bukan hanya melalui media sosial, politik popularitas saat ini juga langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Fenomena pemberian bantuan sembako bahkan memberikan uang sekarang marak terjadi untuk menarik simpati dari masyarakat. Gereja menjadi sasaran oleh para politisi untuk meraih simpati. Tidak sedikit momen keagamaan Kristen menjadi panggung para politisi untuk mengenalkan dirinya. Para politisi juga sering melibatkan para tokoh atau pemimpin Kristen untuk mendukung. Politik popularitas memiliki beberapa dampak dalam konteks politik modern. Ini dapat memengaruhi pemilihan umum, mengubah cara pemilih memandang pemimpin dan partai politik, serta mengarah pada polarisasi politik yang lebih besar. Namun, ada juga kritik terhadap politik popularitas karena seringkali fokus pada citra daripada substansi, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang matang.

Politik popularitas telah memainkan peran penting dalam pemilihan dan kebijakan di seluruh dunia. Contohnya termasuk kampanye presiden Amerika Serikat yang melibatkan penggunaan media sosial oleh Donald Trump, serta penggunaan platform media sosial oleh pemimpin seperti Joko Widodo di Indonesia. Dengan media sosial dan teknologi komunikasi yang terus berkembang, politik popularitas akan tetap menjadi bagian integral dari proses politik modern. Ini menciptakan tantangan baru bagi pemilih dan pemimpin politik untuk membedakan antara pesan yang didasarkan pada popularitas semata dan kebijakan yang substansial.

Politik popularitas dapat melibatkan penggunaan teknik-teknik psikologis untuk memengaruhi pemilih. Misalnya, pemimpin politik dapat memanipulasi emosi pemilih atau menggunakan pemrograman neurolinguistik untuk memperkuat pesan mereka. Ini telah memicu debat etis tentang batasan apa yang seharusnya diberlakukan dalam politik². Media massa memiliki peran penting dalam mempromosikan politik popularitas. Pemberitaan yang berfokus pada drama dan kontroversi sering kali lebih menarik bagi penonton daripada laporan yang mendalam tentang isu-isu kebijakan. Ini dapat mendorong pemimpin politik untuk menciptakan momen kontroversial atau konten yang mengundang perdebatan untuk mendapatkan perhatian media.

² Ibid.

Politik popularitas juga dapat berkontribusi pada polarisasi politik. Ketika pemimpin politik memanfaatkan emosi dan memperkuat pandangan yang sudah ada, ini dapat menghasilkan divisi yang lebih besar dalam masyarakat. Pendukung mereka mungkin semakin memilih ideologi mereka sendiri daripada mencari kompromi. Dalam era politik popularitas, pendidikan politik menjadi semakin penting. Pemilih yang terinformasi dengan baik lebih mungkin untuk mengenali retorika populis dan memilih berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan. Pendidikan politik juga dapat membantu mengatasi efek negatif dari politik popularitas, seperti polarisasi yang merugikan.

Politik popularitas telah mendorong inovasi dalam kampanye politik. Kandidat dan partai politik berusaha untuk menciptakan kampanye yang kreatif dan menarik secara visual untuk menarik perhatian pemilih muda yang lebih terhubung dengan media sosial. Ini mencakup penggunaan video, meme, dan konten visual lainnya. Politik popularitas merupakan fenomena yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Ini memicu perdebatan yang berkelanjutan tentang peran dan dampaknya dalam sistem politik dan demokrasi modern.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Alvary dan Juliati, jemaat Gereja terdampak dengan politik popularitas. Terjadi perpecahan dalam Gereja akibat perbedaan pilihan atau dukungan politik³. Hal ini menunjukkan bahwa politik popularitas tidak dapat dibiarkan oleh Gereja. Sependapat dengan Alvary dan Juliati, penelitian yang dilakukan oleh Indria juga menunjukkan dampak yang sangat serius politik popularitas terhadap Gereja⁴.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber-sumber pustaka dikumpulkan lalu dilakukan kajian oleh penulis. Analisis dimulai dari politik popularitas menurut etika Kristen. Selanjutnya menjabarkan politik popularitas menurut etika Kristen menggunakan Alkitab sebagai referensi utama, juga menggunakan buku-buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik sesuai prinsip *literature review*. Penulis juga menggunakan sumber-sumber acuan yang dapat melengkapi artikel ini masih dianggap menjadi pendukung artikel ini.

³ Alvary Rerung & Julliatu Attu Exan, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale," *KInaa* 4 (2023): 1–17.

⁴ Indria Pricillia Tumbelaka, "No Title" (Univesitas Satya Wacana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Kristen Lebih Mengutamakan Integritas daripada Popularitas

Integritas merupakan hal paling utama dalam etika Kristen. Perenarapan iman Kristen terwujud sempurna dalam sebuah integritas. Integritas mengakui bahwa ada kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Orang yang beretika memiliki integritas. Demikian juga, orang yang bermoral menjalani kehidupan mereka sesuai dengan norma moral yang berlaku. Integritas menjadi salah satu faktor utama dalam sebuah kepemimpinan. "Integritas" berasal dari kata Latin "integer", yang berarti "utuh" atau "keseluruhan", dan "terintegrasi", yang berarti "kesatuan elemen menjadi sesuatu yang utuh dan tak terpisahkan." Integritas terjadi ketika terjadi kesesuaian antara nilai, perilaku dan perbuatan. Melakukan standar etika berdasarkan firman Allah dan memiliki pribadi yang jujur didefinisikan sebagai orang berintegritas. Integritas menunjukkan keterkaitan antara ucapan dan keyakinan yang ditunjukkan dalam tindakan sehari-hari.

Seseorang yang memiliki integritas di mana perilakunya dan kata-katanya selalu sesuai. Integritas tidak terbagi atau berpura-pura; ia ada sebagaimana ia ada. Kehidupannya bersatu, dan ia adalah "seutuhnya". Orang yang jujur tidak akan menyembunyikan apa pun dan tidak akan takut pada apa pun. Hidupnya seperti buku yang terbuka, dengan segala sesuatu yang bisa dilihat setiap hari. Seseorang yang memiliki integritas lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang hanya menyenangkan sesaat. Kemunafikan adalah lawan dari integritas. Seseorang yang munafik tidak cocok untuk mengajar orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik. Integritas penting bagi semua orang. Setiap orang seharusnya memiliki integritas, tidak hanya pemimpin, setiap umat manusia juga seharusnya memiliki integritas⁵.

Salah satu bentuk integritas adalah kepatuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam bukunya "Integritas Menghidupi Kebenaran", Carolyn Nystrom menyatakan bahwa integritas lebih berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri seseorang, seperti motivasi, cita-cita, dan hal-hal lain yang terkait dengan komitmen pribadi seseorang. Integritas juga tidak perlu diumumkan atau ditunjukkan di depan umum.⁶ Berdasarkan uraian tersebut, hal dasar yang harus dilakukan orang Kristen dalam politik adalah memilih pemimpin yang berintegritas. Orang

⁵ Carolin Nystrom, "Integritas Menghidupi Kebenaran" (Malang, 2020).

⁶ Nystrom.

Kristen harus lebih aktif untuk melihat gagasan, ideologi, dan rekam jejak seorang politisi. Politik popularitas tidak dapat diterima etika Kristen jika tokoh politik yang diusung tidak berintegritas. Sebagai apapun cara berkampanye, jika calon pemimpin tersebut tidak memiliki integritas maka perlu disanksinya visi-misinya.

Bahaya Kemunafikan dalam Politik Popularitas

Kisah Tuhan Yesus meresponi para ahli Taurat dan Farisi dalam (Mat. 23:36) merupakan bentuk kewaspadaan terhadap bahaya kemunafikan. Meski menolak, ajaran utama yang ditekankan dalam hal ayat ini justru melakukan semua yang diajarkan oleh para ahli Taurat. Meresponi para ahli Taurat, sekali lagi Tuhan Yesus menolak untuk perbuatan-perbuatan mereka yang munafik. Para ahli Taurat mengajarkan bahkan memerintahkan akan tetapi mereka sendiri tidak dapat melakukan dengan sempurna. Seorang aktor adalah sosok bertopeng yang berusaha membuat orang lain terkesan dengannya. Kata Yunani "hypokrites" mengacu pada seseorang yang memakai topeng dan berpura-pura menjadi orang lain. Ketika agama berubah menjadi semacam sandiwara di panggung pertunjukan, tidak mengherankan bahwa sedekah disambut dengan tiupan trompet, doa berubah menjadi pertunjukan karnaval, dan ketidaknyamanan berpuasa adalah adegan dramatis. (Matius 6:2-5)⁷.

Dalam agama, munafik dapat dilihat melalui berbagai perilaku bersandiwara yang terlihat baik di luar tetapi sebenarnya tidak. Menurut Jonathan Edwards, orang yang terlalu sering terlibat dalam kegiatan ritual keagamaan tidak otomatis mendapatkan anugerah keselamatan. Oleh karena itu, kemunafikan dapat didefinisikan sebagai tingkat ketidakjujuran yang dialami oleh seseorang yang berpura-pura menjadi orang baik dalam kepalsuan. Sesuai dengan definisi sebelumnya, dua komponen kemunafikan akan dibahas dalam artikel ini. Pertama, masalah ketidakjujuran. Kedua adalah penampilan aspal; mereka tampaknya benar-benar asli. Kedua komponen kemunafikan ini akan diperiksa melalui kasus, Pada ayat ke-3, Yesus memerintahkan kepada orang banyak dan murid-murid-Nya untuk melakukan ajaran ahli Taurat dan orang Farisi (*panta oun osa ean eiposin umin poiesate kai tereite*, tetapi secara bersamaan dalam ayat 3), Yesus juga melarang mereka untuk menuruti perbuatan-perbuatan mereka (*kata de ta auton me poieite, legousin garkai ou poiounsin*), karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Dengan demikian, nats ini mengindikasikan pada paralelisme dan penulisan yang menekankan fakta

⁷ Arto Winarto, "KEMUNAFIKAN: PANGGUNG PERTUNJUKAN ORANG BANYAK," n.d.

bahwa ada inkonsistensi antara kata-kata dan tindakan yang menjadi kritik bagi para pemimpin agama. Dalam bentuk paralel, Matius menyatakan paradoks antara ajaran positif mereka dan perilaku negatif mereka⁸.

Di sini Yesus tidak berbicara tentang pengajaran mereka. Yesus mengetahui pengaruh politik, agama, dan sosial mereka. Namun mereka. Matius 23 ayat 1-7 cukup jelas mewaspadaan orang banyak dan para murid tentang kedudukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, selaku pemegang tatanan agama Yahudi. Pengajaran Yesus terhadap kemunafikan orang Yahudi menjadi sebuah etika yang kita dapat ambil dalam menyikapi politik popularitas. Gereja harus memberikan sebuah pandangan dan sikap terkait situasi politik sehingga Gereja dapat memberikan pembelajaran politik terhadap jemaatnya. Orang Kristen harus dapat mempelajari dan mengenali para calon pemimpin politik yang muncul. Gereja harus dapat menunjukan apakah calon pemimpin politik tersebut prilakunya sesuai dengan gagasan yang diajarkan.

Saat ini banyak sekali pejabat maupun politisi yang sangat hebat menyampaikan gagasan, akan tetapi karakter kehidupannya jauh dari kebenaran. Selain itu fungsi Gereja dalam mengajarkan etika politik yang Alkitabiah juga sangat diperlukan agar Gereja tidak terjebak menjadi simpatisan dan bahkan terlibat politik praktis. Gereja harus konsisten untuk berpolitik moral dan etis. Gereja bahkan harus mengajarkan cara memilih pemimpin yang benar. Jika Gereja tidak melakukan fungsi ini, Gereja akan mudah diombang-ambingkan dengan politik popularitas. Sebagai fungsi pendidik atau pengajar politik, para pemimpin Gereja harus mempunyai komitmen untuk berintegritas. Dalam konteks sosial politik di Indonesia, kedekatan atau kekerabatan juga menjadi salah satu media politik popularitas. Kedekatan, kekerabatan atau kesukuan bahkan politik identitas merupakan media yang sangat efektif untuk meraup dukungan suara. Gereja harus berani mengambil sikap tegas terutama terkait keluarga Gereja yang saat ini terjun ke duni politik. Gereja harus berani menilai terhadap anggota atau bahkan pemimpin Gereja yang berpolitik praktis. Gereja harus mampu memberikan penilaian yang objektif karena integritas pemimpin yang menjadi dasar etika Kristen, tidak dapat dihalangi atau digagalkan dengan alasan apapun termasuk kekeluargaan.

Orang Kristen harus berani meninggalkan budaya sungkan agar dapat mewujudkan etika Kristen yang benar dalam politik. Rasa sungkan masih menjadi kendala terbesar Gereja dalam menghadapi politik popularitas yang kompleks. Dalam politik demokrasi

⁸ R. C SProul, *Etika Dan Sikap Orang Kristen* (Jawa Timur: Gandum Emas, 2019).

kepercayaan dan pilihan adalah amanat untuk memberi seseorang untuk bekerja melalui kekuasaan politik. Sebagai amanat Gereja harus memastikan tokoh yang dipilih haruslah orang yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat⁹. Dalam hal ini Gereja atau orang Kristen sejatinya tidak boleh mendukung praktik politik identitas. Sampai saat ini hal ini memang tidak begitu disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang terjebak bahkan menjadi pelaku politik popularitas sehingga kader-kader politik yang mendapat amanat, banyak yang justru menyimpang dengan korupsi dan tindakan tidak etis lainnya.

Berani untuk Tidak Populer

Berbicara tentang popularitas, Yesus memberi teladan untuk justru berani tidak populer melalui peristiwa di danau Galilea. Yesus tidak gila akan pujian dan tidak tergiur dengan dorongan masyarakat untuk jadi pemimpin politik Israel waktu itu. Dengan segala ketenarannya, Yesus sangat memenuhi syarat untuk dengan mudah melakukan politik popularitas. Dengan sangat mudah, bahkan masyarakat sudah menyediakan diri menjadi relawan yang mengangkat Yesus menjadi pemimpin politik¹⁰. Teladan Yesus menjadi etika orang Kristen dalam berpolitik. Banyak orang bahkan terjebak menjadi politik praktis karena ada peluang dan kelompok masyarakat yang mendukung. Jika memang terpanggil untuk politik, tidak ada salahnya orang Kristen masuk politik.

Akan tetapi yang memang tidak terpanggil untuk jadi politisi murni yang seharusnya tidak melenceng ke politik praktis dengan alasan populis. Berdasarkan teladan ini, etika Kristen secara gamblang meminta setiap Kristen tidak menggunakan politik popularitas hanya untuk kepentingan berkuasa. Apalagi kekuasaan yang didapatkan hanya untuk membohongi rakyat dan hanya untuk kepentingan pribadi. Berani menjadi tidak populer ini juga menjadi standart moral orang Kristen yang terjun ke politik. Orang Kristen yang terjun ke politik harus berani menyatakan korupsi di tengah system yang korup. Berani menjadi tidak populer ini tentu tidak lazim dilakukan di politik, akan tetapi ada banyak studi kasus dimana banyak pemimpin yang berani tidak populer justru yang dapat membangun integritas.

⁹ Noh Ibrahim Boiliu, "Etika Teologi Politik : Analisis Etis Teologi Ketaatan Kepada Pemerintah," *Journal Of Chemical Information and Modeling* 8 9 (2017): 1–58.

¹⁰ Paul N Anderson, *The Christology Of the Four Gospel : Its Unity and Disunity in the Light of John* (Valley Forge: Trinity Press Internasional, 2006).

Studi kasus Basuki Tjahaja Utama (Ahok) menjadi cerita bagaimana berani menjadi tidak populer dalam politik merupakan etika Kristen yang harus diterapkan. Keberanian Ahok melawan korupsi bahkan membuat dia harus masuk dalam penjara. Untuk mendapatkan dukungan politik orang Kristen harus jujur dan tidak boleh membohongi masyarakat dengan janji-janji manis atau dengan politik uang atau sembako.

KESIMPULAN

Politik popularitas yang tidak berdasarkan integritas maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan etika Kristen. Proses politik dalam etika Kristen sangat menjunjung tinggi integritas sebagai kebenaran. Selain itu proses politik menurut etika Kristen adalah memilih pemimpin yang amanah bukan karena kedekatan personal maupun hanya kesamaan suku atau agama. Etika Kristen juga mengajarkan berani tidak populer dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan jika politik popularitas tidak sesuai etika Kristen jika politik popularitas tidak diikuti dengan integritas.

REFERENSI

- Anderson, Paul N. *The Christology Of the Four Gospel : Its Unity and Disunity in the Light of John*. Valley Forge: Trinity Press Internasional, 2006.
- Boiliu, Noh Ibrahim. "Etika Teologi Politik : Analisis Etis Teologi Ketaatan Kepada Pemerintah." *Journal Of Chemical Information and Modeling* 8 9 (2017): 1–58.
- Exan, Alvary Rerung & Julliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KInaa* 4 (2023): 1–17.
- Hamirudin. "SURVEI DAN KONSULTAN POLITIK : MEMBANGUN POPULARITAS DAN ELEKTABILITAS POLITIK." *IAIN* 4 (2019): 10–17.
- Indria Pricillia Tumbelaka. "No Title." Univesitas Satya Wacana, 2014.
- Nystrom, Carolin. "Integritas Menghidupi Kebenaran." Malang, 2020.
- SProul, R. C. *Etika Dan Sikap Orang Kristen*. Jawa Timur: Gandum Emas, 2019.
- Winarto, Arto. "KEMUNAFIKAN: PANGGUNG PERTUNJUKAN ORANG BANYAK," n.d.